

ABSTRACT

The number of Non-Governmental Organization (NGO) in Indonesia has been increasing since the reformation era. They are mostly working with government agencies in any sectors to work collaboratively to solve or improve on many issues. However, there is still limited information about how their relationship could affect the success in implementing collaborative governance in the society. One of the oldest NGOs in Indonesia, Rifka Annisa, that concern in women and children protection issue has been doing collaborative work with Kulon Progo government agencies in handling the issue.

This research explained the situation of the relationship between NGO and government agency based on the case study represented within this paper. The purpose of this research is to mainly evaluate the collaborative work between those two actors and stakeholders in order to achieve collaborative governance criteria. This research uses a qualitative method by observation, conducting deep interviews followed by presenting a case study of their collaborative work.

The result of this research could be classified into a collaborative relationship. This was confirmed based on the triangulation data, particularly on the case study result. The level of collaboration is different from one to another level of the government agencies. In the higher level, the collaboration is weaker rather in the lower level of government agency. This is because the NGO usually more focus on community in the specific area rather than in the larger one. The challenges in their future work are based on data recording mechanism, political map or shuffling process, and critical education maintenance in the society in general.

Keywords: Non-Governmental Organization (NGO), government agencies, women and children protection, collaborative governance.

INTISARI

Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia semakin meningkat sejak era reformasi. Kebanyakan dari mereka bekerjasama dengan instansi pemerintah untuk memecahkan atau memperbaiki banyak masalah atau isu yang berada di masyarakat. Salah satu LSM tertua di Indonesia, Rifka Annisa, peduli terhadap isu perlindungan perempuan dan anak telah melakukan kerja sama dengan instansi Pemerintah Kulon Progo dalam menangani masalah tersebut.

Penelitian ini menjelaskan situasi hubungan antara LSM dan instansi pemerintah berdasarkan studi kasus yang direpresentasikan dalam makalah ini. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kerja kolaboratif antara kedua aktor dan pemangku kepentingan untuk mencapai kriteria tata kelola kolaboratif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara observasi, wawancara mendalam, serta penyajian studi kasus hasil kerja kolaboratif mereka.

Hasil penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi hubungan kolaboratif. Hal tersebut dikonfirmasi berdasarkan data triangulasi, khususnya pada hasil studi kasus. Tingkat kerjasama berbeda antara satu dengan tingkat instansi pemerintah lainnya. Di tingkat yang lebih tinggi, kolaborasi lebih lemah daripada di tingkat instansi pemerintah yang lebih rendah. Hal ini karena LSM biasanya lebih fokus pada masyarakat di wilayah tertentu daripada di wilayah yang lebih luas. Tantangan dalam pekerjaan mereka ke depan bertumpu pada mekanisme pencatatan data, peta politik atau proses shuffling pejabat publik setempat, dan pemeliharaan pemikiran serta perilaku pendidikan kritis di masyarakat pada umumnya.

Kata kunci: Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), instansi pemerintah, perlindungan perempuan dan anak, tata kelola kolaboratif.